



KR-Franz Boedusukamanto

Gubernur DIY Sultan HB X menyaksikan Kirab Budaya pada Deklarasi Pemilu Damai Tahun 2024 di Kompleks Keparitihan Yogyakarta, Selasa (21/11/2023).

DEKLARASI PEMILU DAMAI TAK SEKADAR SLOGAN Sultan: Buktikan Masyarakat Cerdas Berpolitik

YOGYA (KR) - Pemda DIY menyelenggarakan Deklarasi Pemilu Damai Tahun 2024 di Bangsal Keparitihan, Yogyakarta, Selasa (21/11). Deklarasi diikuti dan ditandatangani Gubernur DIY, jajaran Forkopimda DIY, Ketua DPRD DIY, Kabinda DIY, Ketua KPU DIY, Ketua Bawaslu DIY, dan pimpinan partai politik peserta Pemilu 2024. Deklarasi ini diharapkan menjadi acuan bagi parpol beserta simpatisan dan peserta Pemilu lainnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah setempat selama pelak-

sanaan Pemilu.

"Saya percaya, kita semua sepemadapat, bahwa, Pemilu damai adalah kerja besar yang membutuhkan partisipasi seluruh elemen bangsa, mulai dari tataran individu. Untuk itu mari kita saling bekerja sama, sehingga Pemilu 2024 dapat menjadi bukti bahwa masyarakat telah cerdas dalam berpolitik. Selain itu menjadi perayaan atas kedewasaan kita sebagai bangsa Indonesia," kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Deklarasi ditandai pembacaan poin-poin penting terkait komitmen peserta dalam menjaga situasi keamanan, tidak menyebarkan berita hoaks, serta tidak memakai isu SARA dalam tahapan kampanye. Parpol juga melakukan penandatanganan komitmen disaksikan penyelenggara Pemilu.

Sultan mengatakan, secara esensi Pemilu merupakan proses pembelajaran dalam rangka pendewasaan bangsa. Pemilu juga merupakan

*** Bersambung hal 7 kol 1**

Sultan: Sambungan hal 1

momentum ujian bagi seluruh elemen bangsa, mengenai seberapa jauh nilai-nilai demokrasi telah menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Untuk itu pihaknya mengajak semua pihak untuk memastikan Pemilu damai tidak semata-mata dimaknai sebagai slogan, tetapi sebagai ikhtiar, untuk menciptakan atmosfer yang kondusif. Jadi menjaga kedamaian selama Pemilu adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa, tanpa terkecuali.

"Kalau terkait sanksi bagi pegawai Pemerintah yang tidak bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilu, konsekuensi itu nanti akan kita pikirkan. Jangan sekarang. Yang penting semua bisa melaksanakan dan konsisten untuk memegang kesepakatan kita bersama," kata Sultan.

Sultan juga menegaskan, perangkat desa dan kepala desa harus netral dalam Pemilu. Mengenai deklarasi dukungan kepada paslon tertentu di Jakarta beberapa hari lalu yang dihadiri ribuan perangkat desa, Sultan enggan berkomentar. "Saya tidak bisa berkomentar ya, itu urusan peserta Pemilu, tapi kita sudah mendeklarasikan bahwa perangkat desa harus netral. Itu saja. Seandainya ada yang melanggar konsekuensi itu akan kita pikirkan, tapi jangan

sekarang. Nanti dikira kami mengancam, nanti salah lagi," terang Sultan.

Ketua Bawaslu DIY Mhammad Najib menegaskan, kepala desa, perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa memang harus netral. "Mereka harus netral sebab sebagai pelayan publik melayani semua, nggak boleh berpihak tentu kalau ada yang melanggar ada konsekuensinya," ujarnya.

Menurut Najib, sampai saat ini belum ditemukan adanya upaya dari ASN DIY hingga tataran perangkat desa yang menunjukkan keberpihakan atau dukungan politik kepada pasangan capres dan cawapres. "Jadi ASN termasuk kepala desa, lurah, perangkat desa itu memang harus netral. Karena mereka adalah pelayan publik harus melayani semuanya tidak boleh berpihak. Tentu kalau ada yang melanggar ya ada konsekuensinya terkait dengan pelanggaran itu," papar Najib.

Sultan juga melepas kirab budaya Yogyakarta Pengawasan Pemilu Damai 2024 menuju Titik Nol Kilometer Yogyakarta. Kirab diikuti Bregada Rakyat Mataram, Bawaslu DIY dan Kabupaten/Kota, Duta Keistimewaan, dan Marching Band STPN.

(Ria)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005